

## ABSTRAK

Dalam perencanaan tata ruang, seringkali data spasial yang dibutuhkan tidak tersedia atau sebaliknya, merupakan duplikasi dari dataset spasial yang telah dibuat atau dikembangkan oleh sektor lain. Hal lainnya adalah pengintegrasian data, yaitu bagaimana data dari beragam sumber dapat diintegrasikan agar dapat menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, di mana terdapat kemungkinan adanya keberagaman dalam format, struktur, tingkat ketelitian, sistem referensi dan lain-lain aspek representasi data spasial. Terkait dengan hal tersebut maka Infrastruktur Data Spasial atau disingkat IDS, dikembangkan untuk menjadi sebuah infrastruktur bagi aplikasi SIG dalam berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Sleman adalah salah satu dari banyak pihak yang mencoba mengembangkan IDS. Pengembangan IDS bermula dari inisiatif Pemerintah Pusat, yaitu Bakosurtanal. Inisiatif ini mendapat respon positif dengan dilakukannya kerjasama dan “*pilot project*” pengembangan interoperabilitas data spasial.

Bagaimanakah pengembangan IDS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, bagaimanakah kesiapan implementasinya, serta bagaimanakah bentuk dukungannya bagi perencanaan tata ruang adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian terhadap berbagai hal yang terkait dengan proses perencanaan tata ruang, data spasial, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia serta organisasi, yang dapat menjadi pendukung dalam pengembangan dan mendorong kesiapan implementasi IDS di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menemukan bahwa ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan ruang sudah lengkap, namun belum harmonis, dilihat dari skala sumber datanya. Data dasar baik peta rupa bumi, citra, maupun foto udara telah tersedia dengan tingkat resolusi tinggi. Meskipun demikian tidak seluruh data tersebut, terutama data spasial tematik wilayah dihasilkan dari pemanfaatan SIG oleh Dinas atau Instansi yang berwenang mengelola data tersebut. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, disamping ketiadaan organisasi SIG dengan struktur yang jelas. Beberapa langkah telah dilakukan dalam merespon permasalahan tersebut, antara lain dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan mengadakan serangkaian pelatihan guna mengembangkan kapasitas SDM.

Hasil temuan positif bagi pengembangan SIG dan IDS adalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung, pimpinan yang responsif, serta kerjasama intensif yang telah dilakukan dengan berbagai pihak dalam penyediaan data spasial.

**Kata Kunci:** perencanaan tata ruang, Infrastruktur Data Spasial (IDS), Sistem Informasi Geografis (SIG), data spasial